

# **MAKALAH SEJARAH**

## **PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA**



Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah

Guru bidang studi :

Bapak : Drs.Kardiyah

Disusun oleh kelompok III :

Anggota: 1. Dewi Sekarsari

2. Siti Nurhasanah

**MADRASAH ALIYAH NEGRI 3 INDRAMAYU KABUPATEN  
INDRAMAYU TAHUN AJARAN 2017-2018**

# DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
E. Indonesia paska-VOC: Masuknya pengaruh perancis danpendudukan inggris.....	
1. Herman Willem Daendels (januari 1808- mei 1811): Gubernur jendral “perancis” yang Keras dan Oriter....	
F. Masa kekuasaan Belanda kedua {1816-1814).....	
1. Kebijakan Tanam Paksa ( <i>Cultuurstelsel</i> ).....	
2. Kebijakan	



## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### A. Indonesia pasca-VOC : Masuknya Pengaruh Perancis dan Pendudukan Inggris

##### **1. Herman Willem Daendls (Januari 1808-Mei 1811): Gubernur Jendral “Perancis” yang Keras dan Otoriter**

Daendles memegang dua tugas utama, yaitu: (1) mempertahankan pulau Jawa agar sampai jatuh ketangan Inggris dan (2) memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama penyelewengan kekuasaan dan korupsi.

- Membangun Jalan Raya Pos atau *de Grote Postweg* dari Anyer (ujung barat Jawa). Penarukan adalah pelabuhan ekspor yang terletak paling ujung Jawa Timur.

Dalam rangka menyukseskan pembangunan jalan itu, Daendles memberlakukan kerja wajib (*verplichte diensten*) serta melanjutkan kebijakan penyerahan hasil bumi wajib (*verplichte leverantie*).

- Mendirikan banteng-banteng pertahanan, seperti Banteng Lodewijk (Louis) di Surabaya, Banteng Messter Cornelis (Jatinegara sekarang) di Batavia, dan lain-lain.
- Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon.
- Membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi, seperti *Legion mangkunegaran*. Legiun ini merupakan satuan organisasi militer yang terkuat dan termodern di Asia pada awal pada abad ke-19.

- Mendirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia.

- Membangun rumah sakit dan tangsi-tangsi militer yang baru.

Selain menerapkan kebijakan dalam bidang pertahanan dan kemiliteran tersebut diatas, Daendels juga menerapkan sejumlah kebijakan lain seperti :

- Membagi Pulau Jawa menjadi 9 (sembilan) prefektur (daerah), setara karesidenan;

- Mengangkat para bupati di seluruh Jawa menjadi pegawai pemerintah;

- Menaikan gaji pegawai agar tetap loyal kepada pemerintah kolonial, serta menindak pegawai yang korup dengan hukuman seberat-beratnya;

- Mendirikan badan pengadilan yang disesuaikan dengan adat-istiadat yang berlaku

*Pertama*, terhadap Solo dan Yogyakarta. Di mata Daendels, semua raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya dan minta perlindungan kepadanya.

Oleh karena itu, Daendels membuat peraturan tentang perlakuan raja-raja Jawa kepada para Menteri di kratonnya. Jika di zaman VOC para presiden Belanda diperlakukan sama seperti para penguasa daerah yang menghadap raja-raja Jawa, dengan duduk di lantai dan mempersembahkan sirih kepada raja Jawa, Menteri tidak layak lagi diperlakukan seperti itu.

*Kedua*, terhadap Banten. Daendels pun menghancurkan Banten dan mengasingkan sultan Banten ke Ambon karena Sultan Banten menentang pembangunan jalan antara Anyer-panarukan. Daendels juga dikenal sebagai penguasa yang otoriter.

Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke Belanda. Ada dua versi tentang alasan pemanggilan ini. Versi pertama mengatakan, tenaganya dibutuhkan untuk memimpin tentara Perancis menyerbu Rusia. Sedangkan versi kedua menyebutkan, pemerintah Belanda-Perancis mendengar berita tentang hubungan buruk Daendels dengan raja-raja dan penduduk Nusantara. Hubungan yang buruk ini dikhawatirkan akan merugikan Belanda Belanda dalam menghadapi kemungkinan serangan Inggris.

Ia kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens (menjabat 20 Februari-18 September 1811). Pada masa pemerintahan Janssens, kekuatan Inggris menyerang ke Jawa (baca *Historia*). Melalui serangan darat dan laut, Inggris berhasil memaksa Janssens menyerah. Janssens beserta pasukannya menyerah kepada Inggris di Tuntang (Jawa Tengah). Penyerahan kekuasaan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang (1811), yang isinya antara lain sebagai berikut:

- Pulau Jawa dan sekitarnya (koloni Belanda) jatuh ketangan Inggris.
- Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari Pemerintah Daendels menjadi tentara Inggris.
- Orang-orang Belanda dapat diperkerjakan oleh Inggris.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang, wilayah Hindia Timur (Nusantara) resmi menjadi koloni Inggris.

## **2. Thomas Stamford Raffles (1811-1814): Letnan Gubernur Inggris**

Inggris menunjukan **Thomas Stamford Raffles** sebagai letnan gubernur. Kekuasaan Inggris di Indonesia ini diwakili oleh kongsi dagang Inggris bernama *East Indian Company* (EIC) yang berkedudukan di Kalkuta, India.

Selama pemerintahannya, Raffles sangat menekankan asas-asas liberal, yaitu kebebasan, kesetaraan derajat manusia, dan supremasi hukum. Hal itu diwujudkan dalam beberapa kebijakan antara lain:

- Menghapus system *preangerstelsel*, kerja paksa, serta menghentikan perdagangan budak;
- Memberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam; pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan.
- Menghapus pajak hasil bumi (*contingenten*) dan penyerahan wajib (*verplichte leverantie*) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC.
- Menetapkan tanah sebagai milik pemerintah, dan petani hanyalah penggarap; Sebagai penggarap, petani dikenakan sewa tanah (*landrent*).
- Pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala.
- Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah, dan jabatan yang

diwariskan secara turun-temurun dihapus.

keresidenan ini berlangsung sampai tahun 1945.

- Membentuk system pemerintah dan system peradilan yang mengacu pada system yang dilaksanakan di Inggris.

Raffles juga memiliki hobi dan bakat pribadi. Ia menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya. Hasil penelitiannya di Pulau Jawa ia tulis dalam sebuah buku yang berjudul *History of java* (Sejarah Jawa).

Masa kekuasaan Raffles relative singkat (1811-1816). Hal itu terkait dengan kekalahan Napoleon (Perancis) dalam Pertempuran Leipzig (*Battle of Leipzig*) pada tahun 1813 melawan pasukan koalisi yang terdiri dari Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia.

Kekalahan Perancis berarti kemerdekaan bagi Belanda. Kemerdekaan itu membuka ruang bagi perundingan dengan Inggris terkait dengan bekas-bekas wilayah kekuasaannya, termasuk diantaranya Nusantara. Hal itu terwujud melalui Konvensi London pada tahun 1814.

## **F. Masa Kekuasaan Belanda Kedua (1816-1942)**

Konvensi London (1814) mengembalikan hak Belanda atas bekas-bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara.

Akan tetapi, situasi sebelum dan setelah penyerahan ini sebetulnya tidak begitu baik bagi Belanda: pemerintah Belanda sendiri sedang mengalami krisis keuangan yang sangat parah.

Dengan latar belakang kas negara yang kosong dan beban utang yang menumpuk ini, dikirimlah **van der Capellen** (1816-1826) sebagai gubernur jenderal. Ia mengemban tugas penting: mengeksploitasi



kekayaan alam Nusantara sebesar-besarnya untuk menutupi kas negara yang kosong itu. Setelah van der Capellen, dikirim pula de Gisignies (1826-1830)

## **1. Kebijakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*): Johannes van den Bosch (1830-1870)**

Van den Bosch menghapus sistem sewa tanah era Raffles (Inggris) dan menerapkan apa yang disebut *Cultuurstelsel*. Secara harfiah, “cultuurstelsel” berarti sistem budaya.

Kebijakan TP sebetulnya bukan hal baru. Sudah sejak abad ke-18 di bawah Gubernur Jendral VOC Hendrick Zwaardecroon (1720-1725), kebijakan ini dirintis di Tanah Sunda (Priangan), namanya *Preangerstelsel* (Sistem Priangan)

**J. van Den Bosch** memperluas perhatiannya ke tanaman-tanaman komoditi tersebut . Ia misalnya mengonsentrasikan penanaman tebu di Batavia, serta kopi dan teh di daerah priangan.

- Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (1/5 alias 20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum (nilai).
- Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau 1/3 dari tahun yang berjalan;
- Waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukan bagi *Cultuurstelsel* tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang dari tiga (3) bulan;
- Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan pada rakyat;

- Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan karena kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah kolonial;
- Pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman *Cultuurstelsel* dilakukan atau disampaikan melalui para kepala desa

Menurut **Ted Sprage** (mengutip Anon, 1851), selain penerapannya yang menyimpang dari gagasan awal, kaum tani dipaksa berjalan berkilo-kilo meter dari desa mereka ke tempat perkebunan kopi. Terkadang mereka harus meninggalkan desa selama berbulan-bulan dan hidup di tempat penampungan sementara dekat dengan area perkebunan kopi. Untuk perkebunan tebu, para petani dipaksa mengubah ladang padi mereka, juga sistem irigasi mereka, menjadi ladang tebu.

Kebanyakan petani harus bekerja selama lebih dari 150 hari dalam setahun untuk *cultuurstelsel*. Pembayaran yang diterima oleh petani sangat kecil dan mereka juga dibebani dengan pajak yang sangat tinggi.

Bagi pemerintah Hindia-Belanda, sistem ini berhasil dengan sangat luar biasa. Kas kerajaan Belanda mengalami surplus. Antara 1831-1871 Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri melainkan mempunyai hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di Kerajaan Belanda.

## **2. Kebijakan Pintu Terbuka (1870-1900): Eksploitasi Manusia dan Eksploitasi Agraria**

### **a. Latar belakang**

Pelaksanaan kebijakan Pintu Terbuka, selanjutnya disingkat PT saja, di Indonesia tidak terlepas dari perubahan peta politik-ekonomi di Belanda pada pertengahan abad ke-19.

- Perubahan politik di Belanda

Pada tahun 1850, Partai Liberal Belanda memenangkan pemilu. Maka, sebagai pemenang, partai ini berhak membentuk dan menjalankan pemerintahan.

- Pengaruh Revolusi Industri

Pada masa ini, Revolusi Industri yang terjadi sejak tahun 1750 di Inggris telah banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda.

b. Penerapan dan dampak Kebijakan Pintu Terbuka

Di Indonesia, sistem ekonomi liberal diwujudkan dalam bentuk apa yang disebut **Kebijakan Pintu Terbuka**. Hal ini sesuai dengan maksud utama kebijakan ini, yaitu *membuka ruang (pintu) seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi*.

Sebagai landasannya, Parlemen Belanda meluncurkan dua undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya: **Undang-undang Agraria** dan **Undang-undang Gula** pada 1870.

- (1) Perkebunan tembakau, seperti di Deli (Sumatra Utara), Klaten dan Klaten (Jawa Tengah), Besuki, Kediri, Jember (Jawa Timur), dan sekitar daerah kerajaan/Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta).
- (2) Perkebunan tebu, seperti di pesisir utara dari Cirebon hingga Semarang, disebelah selatan Gunung Muria hingga Juwana, *Vorstenlanden*, Madiun, Kediri, Basuki, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Surabaya dan Jombang.
- (3) Perkebunan kina di Jawa Barat.
- (4) Perkebunan karet di Palembang dan Sumatra Timur.

- (5) Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.
- (6) Perkebunan the di Jawa Barat dan Sumatra.

- Eksploitasi manusia

Eksploitasi manusia yang dimaksud berupa pengerahan tenaga manusia yang diwarnai tipudaya dan paksaan serta ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang mereka alami di perkebunan-perkebunan itu.

Untuk menjelaskan **eksploitasi manusia**, kita dapat mengambil contoh di perkebunan-perkebunan, terutama di Deli, dan lokasi-lokasi pertambangan.

- Eksploitasi agrarian

produktif yang sedang dikerjakan rakyat maupun lahan-lahan kosong yang masih brupa hutan untuk dijadikan perkebunan serta areal pertimbangan.

Untuk menjelaskan dampak eksploitasi tersebut, kita ambil perkebunan-perkebunan di Jawa sebagai contoh.

Sekurang-kurangnya ada empat dampak negative dari kebijakan TP bagi masyarakat Jawa:

- (1) Para priyayi dan birokrat kesultanan, yang disebut (*patuh*), menyewakan *tanah lungguh* yang menjadi sumber hidup masyarakat kepada pengusaha-pengusaha perkebunan (*onderneming*) swasta asing.
- (2) Di lahan-lahan perkebunan-perkebunan yang mereka kelola sebelumny itu, rakyat Jawa dijadikan tenaga kerjanya dengan sistem pengupahan serta kondisi kerja yang tidak adil.
- (3) Sebagian masyarakat Jawa dikirim secara paksa ke Suriname untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda di tempat itu.

Para bupati di 18 wilayah keresidenan di Jawa ikut menyewakan sebagian tanah yang di berada di wilayah kekuasaanya (disebut tanah *mancanegara*) keada pengusaha-pengusaha perkebunan swasta asing.

### **C. Reaksi terhadap Kebijakan Pintu Terbuka**

Praktik eksploitasi dalam penerapan kebijakan PT memunculkan sebutan baru terhadap kebijakan ini, yaitu **Politik Pintu Terbuka**.

Kata “politik” menunjukkan bahwa kebijakan itu lebih merupakan alat baru pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi rakyat dan kekayaan alam Indonesia, bukan sarana menyejahterakan rakyat Indonesia.

### **3. Politik Etis: 1901**

Kebijakan atau Politik Etis (selanjutnya disingkat PE) mencakup dua bidang: politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, para penggagas PE menyerukan segera diterapkannya **kebijakan desentralisasi**. Sementara itu, PE dalam bidang ekonomi diterjemahkan dalam apa yang disebut **Trias van Deventer**.

Pada intinya, mereka menyatakan agar *pemerintah kolonial harus lebih memperhatikan nasib pribumi di tanah jajahan dan memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi*.

Van Deventer (1857-1915) adalah seorang praktisi hukum di Hindia-Belanda yang kemudian menjadi politisi di negeri asalnya. Saat masih menjadi penasihat hukum bagi berbagai perusahaan swasta di Hindia-Belanda, van Deventer pernah menulis surat kepada orangtuanya.

Beberapa tahun kemudian, van Deventer membuat karangan terkenal dalam majalah *De Gids* (Panduan) pada tahun 1899.

Dalam tulisan berjudul *Een Eereschuld* (Utang Budi) di majalah tersebut.

Kritik mereka, terutama kritik van Deventer, memengaruhi lahirnya **Politik Etis (PE)**.

Ratu Wilhelmina kemudian menuangkan panggilan moral tadi ke dalam apa yang kelak disebut **Trias van Deventer**, yang meliputi:

(1) **Irigasi** (pengairan), yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.

(2) **Migrasi**, yaitu mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk.

(3) **Edukasi**, menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan.

Banyak terjadi penyimpangan penerapan Politik Etis di lapangan, di antaranya:

- **Irigasi**: pengairan dialirkan hanya ke tanah-tanah perkebunan swasta, bukan ke tanah-tanah pertanian rakyat

- **Edukasi**: diselenggarakan dua macam pengajaran; pertama, untuk anak-anak pegawai negeri, bangsawan, dan orang-orang yang mampu, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar; kedua, untuk rakyat biasa, yang hanya diberi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung setingkat kemampuan siswa sekolah dasar kelas 2, dan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Tujuan diselenggarakannya pengajaran untuk rakyat biasa adalah mendapatkan tenaga administrasi yang murah untuk dipekerjakan di kantor-kantor pemerintahan nantinya.

- **Migrasi** keluar Pulau Jawa ternyata ditujukan ke perkebunan-perkebunan swasta dan perkebunan milik pengusaha-pengusaha Belanda dan swasta asing. Rakyat yang mengikuti program ini

dijadikan sebagai kuli kontrak, seperti yang terjadi di Deli (Sumatra Utara) dan di Lampung.

Salah seorang dari kelompok etis bernama **Mr. J.H. Abendanon**, Menteri kebudayaan, Agama, dan Kerajinan (1900-1905) di Hindia-Belanda pada masa itu.

Secara khusus, jika saja paham PE tak pernah muncul di Belanda, mungkin tak akan lahir Dr. Wahidin Sudirohusodo serta Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan modern Indonesia yang pertama, yang hari berdirinya, 20 Mei 1908, sampai kini kita sepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.